

BAB V

KESIMPULAN

India merupakan suatu negara yang memiliki potensi berupa perindustrian farmasi yang baik terlebih pasca pemberlakuan *Patent Act* 1970. Dalam aturan paten ini, India mencabut aturan paten di bidang farmasi, pertanian, dan bahan kimia. Aturan ini kemudian memberikan India kebebasan untuk dapat memproduksi suatu jenis obat yang masih berada dalam jangkauan paten secara massal dan legal.

Di tahun 1995, India sebagai anggota resmi dari GATT yang kemudian berubah menjadi WTO harus menaati beberapa regulasi dan peraturan yang bertentangan dengan kebijakan nasional India, terlebih dalam bidang hak kekayaan intelektual yang dibahas dalam TRIPS (*Trade Related of Intellectual Property Rights*). Melalui rezim ini, India tidak diperbolehkan lagi untuk memberlakukan pasal dalam *Patent Act* 1970 dikarenakan hal itu merupakan suatu bentuk kecurangan terhadap jasa para penemu. Melalui TRIPS, India diwajibkan untuk menaati aturan paten yang berlaku selama jangka waktu 20 tahun hingga masa paten tersebut berakhir. Untuk dapat memenuhi seluruh regulasi TRIPS, India kemudian diberikan jangka waktu selama 10 tahun terhitung sejak tahun 1995, sesuai yang termaktub dalam Pasal 65.2 TRIPS.

3 tahun sebelum memasuki tahun 2005, India mulai menyadari bahwa posisi ini akan menyulitkan India dalam mempertahankan produktivitas obat dan perkembangan perusahaan farmasi lokal, karena kemampuan dari lembaga riset dan pengembangan (R&D) yang belum maksimal. Maka dari itu, India kemudian memutuskan untuk membeli lisensi beberapa obat dari perusahaan farmasi

multinasional untuk kelangsungan pertumbuhan lembaga riset dan pengembangan (R&D) yang lebih baik. Untuk kedua kalinya, India harus merasakan adanya dominasi yang dilakukan pihak asing terhadap keberlangsungan industri lokal.

Kondisi ini menimbulkan beberapa kekhawatiran yang dikemukakan oleh beberapa pihak, baik internal maupun eksternal. Kekhawatiran ini muncul ketika banyak perusahaan farmasi multinasional yang masuk dan membawa banyak tenaga kerja dari luar, serta kemampuan perusahaan mereka dalam mengatur harga obat yang dikhawatirkan dapat membuat harga obat semakin naik.

Kekhawatiran yang muncul tersebut membawa dukungan dari pihak internal yaitu masyarakat India serta eksternal dari beberapa INGO dan negara-negara berkembang agar India dapat mempertahankan industri farmasi lokal. Dukungan inilah yang mempengaruhi India untuk mengeluarkan sebuah kebijakan baru yaitu *Patent Act 2005* dan beberapa regulasi yang mendukung agar industri farmasi lokal terus berkembang.

Melalui kebijakan ini, meski perusahaan farmasi multinasional kembali memasuki India, namun kekuasaan mereka tetap dapat dikontrol oleh regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah India. Pemerintah India bahkan dapat meminimalisir kekuasaan perusahaan farmasi multinasional dan tetap mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan masyarakat lokal. Bergabungnya perusahaan farmasi multinasional di India bahkan membantu guna terciptanya obat yang semakin bervariasi, dan memperkuat jaringan India untuk mengekspor obat-obatan ke pasar yang lebih luas.